

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab satu ini penulis akan membahas mengenai Pendahuluan. Bab ini akan dibagi menjadi delapan sub bab, antara lain sebagai berikut: latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penulisan, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan. Sub bab tersebut masing-masing akan dipaparkan sebagai berikut:

A. Latar Belakang

Rohingya merupakan sebuah etnis yang berada di sebuah kawasan yang dulu bernama Arakan, wilayah ini merupakan bagian dari wilayah Myanmar. Rohingya merupakan sebuah warna yang berbeda bagi masyarakat Myanmar sebab mayoritas Etnis Rohingya beragama Islam dan hidup di tengah penduduk Myanmar yang beragama Budha. Selain itu dari segi penggunaan bahasa dan bentuk kemiripan wajah, Etnis Rohingya tidak memiliki kedekatan dengan penduduk Myanmar pada umumnya melainkan memiliki kedekatan dengan Bangladesh, India maupun Arab. Berbagai macam perbedaan ini telah melahirkan konflik yang hingga saat ini belum saja berkesudahan.

Diawal kemerdekaan Myanmar, Etnis Rohingya dan penduduk Myanmar pernah hidup berdampingan dengan damai. Kala itu Myanmar dipimpin oleh rezim yang demokratis yaitu berada dibawah kekuasaan pemerintah sipil U Nu.

Peristiwa tersebut terjadi semenjak Myanmar lepas dari kekuasaan Inggris pada tahun 1948 – 1962. Meskipun pemerintahan demokratis hanya berlangsung sebentar hanya 14 tahun saja, tetapi disaat itu Etnis Rohingya mendapatkan pengakuan dari pemerintah Nyanmar bahwa Etnis Rohingya pun juga menjadi warganegara Myanmar. Bahkan Pada bulan April 1960 Perdana Menteri U Nu mengizinkan penggunaan bahasa Rohingya pada *Burma Broadcasting Service*. Selama 14 tahun itu pula Etnis Rohingya dapat berpartisipasi dalam pemilu. Perwakilan dari Etnis Rohingya pun ada yang diangkat menjadi Sekretaris Parlemen dan juga Menteri Kesehatan.

Akan tetapi kondisi tersebut telah berubah. Etnis Rohingya tidak diakui keberadaannya oleh pemerintah Myanmar. Banyak sekali perilaku-perilaku keji pemerintah yang berdaulat untuk menunjukkan bahwa Pemerintah Myanmar sangat tidak peduli terhadap Warga Etnis Rohingya. Kekejian tersebut dimulai sejak tahun 1962 yaitu sejak Myanmar dipimpin oleh Junta Militer. juga semenjak diberlakukannya *Burma Citizen Law* yang disahkan pada tahun 1982. Di dalam undang-undang tersebut diatur siapa saja yang berhak menyandang predikat sebagai warga negara Myanmar. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang memperoleh kewarganegaraan melalui warganegara Myanmar asli, warganegara diasosiasikan dan warganegara diaturalisasikan¹. Diluar dari tiga hal itu maka tidak dapat disebut sebagai warganegara Myanmar.

¹ *Burma Citizen Law*, 1862 (diakses pada 14 Maret 2011), bersumber dari [Http: http://www.baliprocess.net/files/Myanmar/Myanmar%20citizenship%20law%201982-eng.pdf](http://www.baliprocess.net/files/Myanmar/Myanmar%20citizenship%20law%201982-eng.pdf)

Posisi Rohingya sangat dilematis. Sebab, meskipun Etnis Rohingya menempati Arakan yang merupakan bagian dari Myanmar tetapi ternyata Etnis Rohingya merupakan satu-satunya etnis tidak termasuk dalam etnis-etnis yang diakui di Myanmar. Hal ini menyebabkan Etnis Rohingya ditindas oleh Junta Militer Myanmar. Junta Militer merasa bahwa Etnis Rohingya bukanlah bagian dari mereka sehingga Etnis Rohingya tidak berhak untuk mendapatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai warganegara Myanmar. Termasuk tidak diizinkan untuk mendirikan masjid, juga tidak diberi akses untuk memperoleh pendidikan yang layak dan perawatan kesehatan. “Sebaliknya, kami dipaksa bekerja sebagai prajurit dan harus membayar uang kepada pemerintah untuk membangun Kuil-Kuil Buddha sedangkan mereka tahu bahwa kami adalah penganut agama Islam². Berbagai tindakan keji yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar tentu saja meresahkan dan menciderai hati dan perasaan Warga Etnis Rohingya. Hal ini menyebabkan banyak Etnis Rohingya tertekan dan memutuskan berdifusi ke berbagai negara.

Pada masa lalu ada 2 juta muslim Rohingya menempati Arakan State. Akan tetapi saat ini, menurut informasi dari *Rohingya Information Centre* yang berada di Kuala Lumpur menyatakan bahwa ada sekitar 500.000 Rohingya di Saudi Arabia, 200.000 di Pakistan, 200.000 di Bangladesh, 50.000 di Uni Emirat

² *Derita Muslim Rohingya di Pengungsian*, (diakses pada 25 Desember 2010), diperoleh dari: <http://penerang.com/2010/11/01/derita-muslim-rohingya-di-pengungsian/>

Arab, dan 15.000 jiwa di Malaysia³. Pada Desember 2008, kurang lebih ada 1.200 Etnis Rohingya yang meninggalkan Myanmar menuju Thailand. Karena kedatangan mereka yang tidak wajar menyebabkan otoritas Thailand merasa tidak nyaman dan kemudian mengusir sebagian ke laut sehingga dikenal sebagai manusia perahu.

Sebagian dari pengungsi ada yang sampai di laut Andaman Aceh. Menurut data terakhir tahun 2009 mengatakan bahwa jumlah pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia ada 391 orang. Manusia perahu Rohingya yang tiba di perairan Sumatera melalui dua gelombang, yaitu pada 7 Januari 2009 (193 orang, ditampung sementara di Pulau Weh, Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam) dan 3 Februari 2009 (198 orang, ditampung sementara di Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur, NAD)⁴. 22 orang yang berhasil diselamatkan oleh Indonesia telah meninggal dunia karena haus dan lapar. 300 telah tenggelam dan meninggal dunia, dan sebagian yang lainnya telah mengungsi ke negara tetangga (Bangladesh, India dan lain-lain)

Indonesia sebuah negara dengan luas wilayah 1,904,569 km² ⁵. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia adalah

³ “Heru susetyo, Nestapa Rohingya Kian Dilupa,” *Sabili*, 4 Juni 2009, 23

⁴ *Pengungsi Rohingya di Aceh: Hampir 400 Pengungsi Segera Dideportasi*, (diakses pada 7 Februari 2009), bersumber dari <http://nasional.vivanews.com/news/read/27948-hampir-400-pengungsi-segera-dideportasi>

⁵ *Indonesia*, (diakses pada 2 Oktober 2010), bersumber dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html>

237.556.363 jiwa⁶, merupakan sebuah negara yang padat penduduk, meskipun demikian Indonesia merupakan salah satu negara tujuan yang paling diminati oleh para pengungsi tersebut meskipun hanya sebagai tempat transit saja.

Mengetahui kondisi Etnis Rohingya yang demikian membuat Indonesia tidak tinggal diam. Sebenarnya ada banyak kemungkinan yang bisa dipilih oleh Indonesia menyikapi kedatangan Pengungsi Etnis Rohingya. Indonesia bisa saja memilih untuk menolak dan mengusir Warga Etnis Rohingya sebagaimana yang dilakukan oleh Thailand dan Malaysia. Akan tetapi pilihan Indonesia adalah menerima Pengungsi Etnis Rohingya tersebut serta gigih memperjuangkan nasib mereka di dalam forum-forum internasional.

Bentuk-bentuk penerimaan Pemerintah Indonesia tercermin dari sikap perlakuan yang baik yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Pengungsi Etnis Rohingya tersebut. Bahkan Pemerintah Indonesia juga memberikan tanggap darurat berupa pemberian bantuan kemanusiaan dalam bentuk *shelter*, makanan, minuman dan obat-obatan untuk Pengungsi Etnis Rohingya yang berhasil mendarat di wilayah Indonesia. Para pengungsi tersebut juga di perbolehkan untuk tinggal di Indonesia sampai memperoleh penyelesaian yang konfrenhensif.

Bentuk-bentuk kegigihan Indonesia memperjuangkan nasib Pengungsi Rohingya tercermin dalam beberapa kiprah Indonesia di forum Internasional. Di

⁶ *Penduduk Indonesia menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2010*, (diakses pada 4 Maret 2011), bersumber dari http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=12¬ab=1

forum tingkat dunia seperti PBB, Indonesia juga turut mengundang UNHCR untuk terlibat dalam proses penanganan terhadap Pengungsi Rohingya. Meskipun dalam proses verifikasi awal Pemerintah Indonesia tidak melibatkan UNHCR dikarenakan data awal yang diperoleh menunjukkan bahwa motif utama kedatangan etnis tersebut adalah *economic migrant*. Akan tetapi karena adanya indikasi kuat bahwa orang-orang tersebut merupakan korban dari tindak kejahatan penyelundupan manusia (*trafficking-in-person* atau *people smuggling*). Selain itu isu Etnis Rohingya telah menjadi bahasan di Forum Dewan HAM PBB atas tuduhan pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas yang beragama Islam maka pemerintah Indonesia memutuskan untuk melibatkan UNHCR.

Selanjutnya dengan berpedoman Piagam ASEAN yang mulai berlaku 15 Desember 2008, Indonesia bertemu dengan negara-negara ASEAN terutama negara-negara asal, negara tempat transit dan negara penerima Pengungsi Rohingya. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas solusi yang praktis dalam rangka menangani masalah Pengungsi Etnis Rohingya. Sebab dalam piagam ASEAN tersebut di dalamnya menyatakan bahwa setiap negara anggota ASEAN memiliki keterikatan untuk memajukan dan menghormati HAM serta bekerja sama untuk tidak mengalihkan beban pada sesama negara ASEAN lain akan tetapi bekerja sama untuk mencari solusi⁷.

⁷ Pokok-pokok Press Briefing Menlu RI, 6 Februari 2009, (diakses pada 29 Desember 2010), bersumber dari <http://www.deplu.go.id/Pages/PressBriefing.aspx?IDP=71&l=id>

Selain mengundang PBB, Indonesia pun turut memperjuangkan nasib Pengungsi Rohingya dalam forum *Bali Proses*. *Bali Proses* merupakan pertemuan bersama tingkat Menteri yang di prakasai oleh Indonesia dan Australia. Forum ini dibentuk juga didorong oleh keperluan penanganan *trafficking in person* dan *people smuggling* yang berasal dari Irak, Iran dan Afghanistan yang transit di pulau-pulau Indonesia menuju Australia. Forum *Bali Proses III* ini diadakan pada 14-15 April 2009 yang dihadiri oleh Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodia, China, India, Iraq, Japan, Kiribiti, Lao PDR, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, New Zealand, Palau, Papua Nugini, Filipina, Republik Korea, Samoa, Singapura, Kepulauan Solomon, Sri Lanka, Siria, Thailand, Timor Leste, Turki, Vanuatu dan Vietnam, UNHCR, Austria, Kanada, Norwegia, Rusia, Afrika Selatan, Spanyol, Belanda, Amerika Serikat, World Bank, UNODC, Interpol, IFRC, Sekretariat ASEAN, dan APC hadir sebagai *observer* (pengamat)⁸

Sebelum Forum *Bali Proses* digelar Indonesia juga melakukan upaya bilateral untuk meyakinkan tentang pentingnya membahas isu Rohingya bagi negara-negara yang terkait dengan Pengungsi Etnis Rohingya. Akhir tahun 2008 Indonesia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Australia untuk menyelenggarakan kembali *Bali Process*. Indonesia juga mengusulkan kepada Thailand agar membahas nasib para Pengungsi Rohingya di forum *Bali Proses*.

⁸ *Joint Ministerial Statement And Bali Process*, (diakses pada 4 Januari 2010), bersumber dari http://www.imigrasi.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=106

Pada Rabu, 11 Februari 2009 di Jakarta, akhirnya Thailand setuju untuk menerima usulan Indonesia tersebut⁹. Senin 16 Maret 2009 Presiden Indonesia mengadakan pembicaraan bilateral dengan PM Myanmar Jenderal Theim Sein di Istana Merdeka Jakarta. Salah satu agendanya adalah juga membahas tentang Rohingya yang akan dibahas di *Bali Proses*. Pada pertemuan bilateral tersebut pula Indonesia juga menyeru kepada Myanmar untuk segera mempercepat peralihan dari sistem diktator (Junta Militer) kepada sistem yang demokratis. Yaitu dengan menjalankan pemilu yang berjalan dengan kredibel, transparan, jujur, dan inklusif. Sehingga dunia pun ikut menyambut baik hasil pemilu. Sebab, Indonesia tidak ingin memulangkan Pengungsi Rohingya jika kondisi dalam negeri Myanmar masih dipimpin oleh junta Militer.

Pada saat yang bersamaan Indonesia tengah diancam oleh peningkatan jumlah pengangguran yang diperkirakan akan mencapai peningkatan 9 % dari tahun 2008 yang sebesar 8,5%. Angka pengangguran 2009 mengalami kenaikan karena penyerapan tenaga kerja dari sektor industri tumbuh negatif yang merupakan imbas dari krisis ekonomi¹⁰ kondisi ini tentu memprihentikan, karena akan berimplikasi pada meningkatnya jumlah kemiskinan di Indonesia. Jumlah orang miskin pada tahun 2009 diperkirakan melonjak ke angka 33,714 juta orang,

⁹ *Thailand setuju usul RI Soal Pengungsi Rohingya*, (diakses pada 11 Februari 2009), bersumber dari <http://internasional.kompas.com/read/2009/02/11/15510877/Thailand.Setuju.Usul.RI.soal.Pengungsi.Rohingya>

¹⁰ *Angka Pengangguran 2009 Naik Jadi 9%*, (diakses pada 28 Agustus 2008), bersumber dari <http://koranIndonesia.com/2008/08/28/angka-pengangguran-2009-naik-jadi-9/>

lebih tinggi dari target yang diinginkan pemerintah, yaitu pada level 32,38 juta orang¹¹.

Deplu yang dibantu oleh beberapa organisasi kemanusiaan internasional (IOM dan ICRC) membuat penelitian untuk mengetahui motif sebenarnya di balik kedatangan manusia-manusia perahu tersebut. Dari penelitian tersebut di peroleh temuan awal yang menyatakan bahwa motif utama dari kedatangan manusia perahu adalah *economic migrant*. Kedatangan manusia perahu tersebut adalah dalam rangka memperoleh penghidupan yang lebih baik sebab di negara asal mereka Etnis Rohingya tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki harkat hidupnya.

Kondisi tersebut tetap tidak mengurangi sikap penerimaan yang baik Indonesia terhadap Pengungsi Etnis Rohingya. Terutama setelah mengetahui motif utama mengapa warga Etnis Rohingya meninggalkan tanah kelahirannya. Meskipun Indonesia tengah diacaman dengan kondisi ekonomi dalam negeri yang tidak kondusif, Indonesia tetap memberikan penanganan yang terbaik untuk para pengungsi tersebut dan memperjuangkan nasib Pengungsi Etnis Rohingya di forum-forum internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian diatas maka dapat ditarik sebuah permasalahan sebagai berikut:

¹¹ *Kemiskinan Bertambah*, (diakses pada 13 Februari 2009), bersumber dari <http://cetak.kompas.com/read/2009/02/13/01295551/kemiskinan.bertambah>

Apa pertimbangan Indonesia menerima Pengungsi Rohingya dan gigih memperjuangkan nasib Pengungsi Rohingya di forum-forum internasional pasca pengusiran oleh Myanmar pada Desember 2008?

C. Kerangka Pemikiran

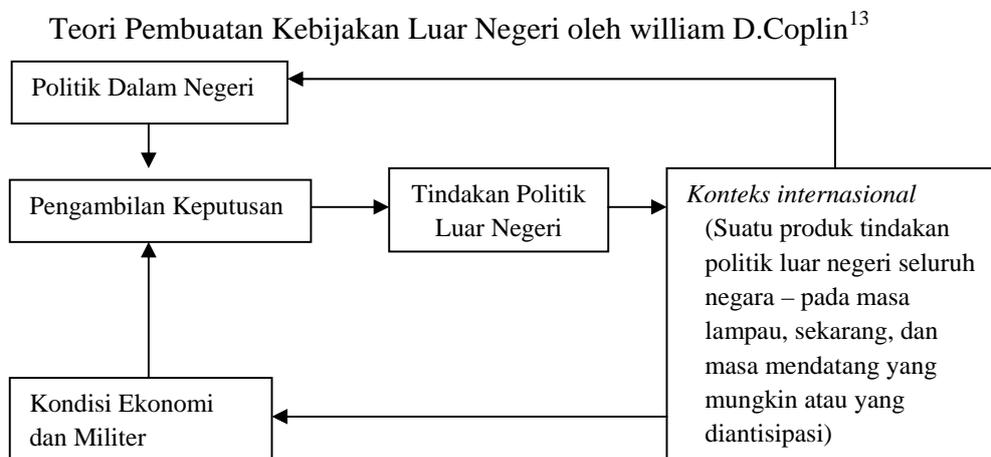
Teori Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri

Segala macam tindakan yang dilakukan oleh negara dalam rangka menanggapi isu-isu tertentu tidaklah diambil secara sembarangan. Termasuk dalam kebijakan-kebijakan yang dihasilkan terkait isu-isu tersebut pun tidak lepas dari pertimbangan-pertimbangan yang matang.

Pembuatan kebijakan luar negeri pun juga demikian. Kebijakan politik luar negeri yang diambil suatu negara merupakan hasil dari sebuah proses yang matang yang mungkin bisa dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijakan. Konsiderasi tersebut adalah; pertama kondisi politik dalam negeri; kedua adalah kemampuan ekonomi dan militer; ketiga adalah konteks Internasional¹² yaitu posisi khusus negara dalam hubungannya dengan negara lain dalam sistem tersebut. Jika digambarkan dalam sebuah bagain akan menjadi sebagai berikut:

¹² William D. Coplin, *Introduction to International Politics, A Theoretical Overview (terjemahan M. Marubun)*, CV Sinar Baru, Bandung 1992, 30

Gambar 1.1



Sumber: William D. Coplin, *Introduction to International Politics, A Theoretical Overview* (terjemahan M. Marubun), CV Sinar Baru, Bandung 1992
hal:30

Di dalam bagan tersebut bisa dijelaskan bahwa kebijakan atau tindakan politik luar negeri pada suatu negara untuk menyikapi suatu isu tertentu dapat dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri. Kondisi dalam negeri antara lain kondisi ekonomi dan militer serta kondisi domestik politik. Diluar dari area kondisi dalam negeri, konteks Internasional juga turut mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri, meskipun tidak secara langsung berpengaruh terhadap tindakan politik luar negeri.

Mengambil kesimpulan dari paparan tersebut benarlh bahwa kebijakan Politik luar negeri dipengaruhi oleh tiga hal yaitu: politik dalam negeri, kondisi

¹³ *Ibid.*

Ekonomi dan militer serta konteks Internasional. Berpedoman dari bagan tersebut yang dirilis oleh Wiliam D. Coplin penulis akan mencoba menguraikan pertimbangan Indonesia memperjuangkan nasib Pengungsi Rohingya serta sikap penerimaan yang baik Indonesia terhadap para pengungsi tersebut.

a. Kondisi Politik Dalam Negeri

Kondisi dalam negeri merupakan faktor yang membawa dampak besar bagi politik luar negeri. Setiap negara satu dengan negara yang lainnya memiliki kondisi politik dalam negeri yang berbeda-beda. Terdapat dua konsep yang mempengaruhi perumusan politik luar negeri. Konsep yang pertama adalah mengenai sistem politik terbuka dan sistem politik tertutup. Konsep yang kedua adalah mengenai banyak faktor (*policy Influencer*) yang mempengaruhi kondisi politik dalam negeri untuk membuat suatu kebijakan tertentu. Terdapat 4 macam jenis folicy influencers yaitu (1) partisan, (2) birokratis, (3) kepentingan, (4) *mass influencers*¹⁴

Motif Indonesia dalam memperjuangkan nasib Pengungsi Etnis Rohingya tidaklah lepas dari *policy influencer* yang berada di sekeliling para pengambil kebijakan. Selain itu kondisi Politik Dalam Negeri Indonesia yang menggunakan sistem demokrasi telah memperbesar porsi *policy influencer* untuk semakin mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Indonesia. Sebab

¹⁴ *Ibid.* hal. 81-82

di dalam pemerintahan yang demokratis *policy influencer* sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan.

Tercatat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam yaitu berjumlah 182,570,000 orang¹⁵. Jumlah ini pula yang mengukuhkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia. Kondisi ini tentu saja berbanding lurus dengan banyaknya organisasi masyarakat dan partai-partai politik yang bernafaskan Islam. Organisasi-organisasi Islam tersebut misalnya adalah Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, PERSIS, dan lain-lain serta PBB, PPP, PKS, juga PAN yang meskipun tidak berbasis Islam secara langsung akan tetapi struktur dan tokoh-tokoh dalam partai tersebut memungkinkan PAN turut mendukung perjuangan untuk Rohingya.

Bahkan Din Syamsudin yang pimpinan Ormas Muhammadiyah pernah membuat pernyataan bahwa Muhammadiyah siap menampung para pengungsi tersebut jika pemerintah sudah tidak sanggup lagi menyokong para pengungsi tersebut¹⁶. Hasyim Muzadi yang merupakan tokoh NU pun turut mengiyakan pendapat dari Muhammadiyah. "Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar

¹⁵ *10 negara dengan populasi terbesar di dunia*, (diakses pada 13 Januari 2011), bersumber dari <http://ramadhaniricky.blogspot.com/2010/08/10-negara-dengan-populasi-muslim.html>

¹⁶ *M Din Syamsudin – Muhammadiyah Siap Membantu para Pengungsi Muslim Rohingya*, (diakses pada 13 Januari 1011), bersumber dari http://www.m-dinsyamsuddin.com/index.php/Muhammadiyah_Siap_Membantu_para_Pengungsi_Muslim_Rohingnya.html

di dunia dan sebagai sesama negara ASEAN, Indonesia sebaiknya tampil untuk membantu"¹⁷.

Selain itu Indonesia juga memiliki kebiasaan baik dalam menerima pengungsi yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari negara asalnya. Contohnya adalah vietnam sebagai manusia perahu yang pernah mendarat di Indonesia dalam jumlah yang banyak. Belajar dari pengalaman tersebut dan mengingat kedua Ormas tersebut merupakan basis kantong massa Islam yang terbesar di Indonesia. Didukung dengan pengaruh dari partai-partai Islam dan kelompok-kelompok kepentingan yang ada di Indonesia maka Pemerintah Indonesia terutama Rezim Susilo Bambang Yudoyono sudah sepantasnya untuk mengatakan ya, menerima dan memperjuangkan nasib Pengungsi Etnis Rohingya di forum-forum Internasional.

a. Kemampuan Ekonomi dan Militer

Dalam rangka mengambil kebijakan politik luar negeri harus mempertimbangkan kekuatan ekonomi dan militer. Ekonomi dan militer merupakan isu yang sangat penting. Sebuah negara tidak akan mampu berdiplomasi dengan baik jika tidak mempunyai kemampuan ekonomi dan militer yang baik pula.

Kondisi ekonomi dan militer Indonesia memanglah tidak kuat. Sebagaimana yang telah diuraikan didalam Latar belakang Masalah bahwa

¹⁷ *Ormas Islam desak pemerintah Bantu Rohingya*, (diakses pada 13 Januari 2011), bersumber dari http://republika.co.id:8080/koran/14/29289/Ormas_Islam_Desak_Pemerintah_Bantu_Rohingya

bersamaan dengan penerimaan Indonesia terhadap Pengungsi Etnis Rohingya kondisi perekonomian Indonesia tengah dilanda krisis ekonomi sehingga menyebabkan perekonomian Indonesia tidak kondusif. Militer Indonesia pun juga tidak dalam keadaan yang baik. Selepas dari embargo persenjataan yang diberikan untuk Indonesia menyebabkan Indonesia tidak memiliki kelengkapan militer yang memadai.

Indonesia memperjuangkan nasib Pengungsi Etnis Rohingya di forum internasional adalah dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan pertahanan dalam negeri. Meskipun Pengungsi Etnis Rohingya yang datang ke Indonesia tidak dalam jumlah yang banyak tetapi jika tidak ditangani dengan baik maka akan semakin banyak saja para imigran gelap yang menjadikan Indonesia sebagai transit. Jika itu terus berlanjut tentu saja akan membawa dampak bagi Indonesia.

Untuk itu perlu penanganan yang spesifik. Deplu menyatakan bahwa Pemerintah RI meminta agar negara-negara asal menghentikan arus keluar manusia perahu, dan menghentikan atau mengurangi alasan yang menyebabkan terjadinya arus pengungsi ke negara lain karena hal itu akan membebani negara lain sebagai negara penerima maupun negara transit¹⁸.

b. Konteks Internasional

¹⁸ *Pokok-pokok Press Briefing Menlu RI, 6 Februari 2009*, (diakses pada 29 Desember 2010) bersumber dari <http://www.deplu.go.id/Pages/PressBriefing.aspx?IDP=71&l=id>

Konteks Internasional yaitu lingkungan internasional dimana negara itu berada dalam hubungannya dengan negara lain. Meskipun Indonesia belum meratifikasi konvensi tentang Status Pengungsi 1951 (*Convention Relating to the Status of Refugees*) di Jenewa ataupun protokol PBB tahun 1967. Tetapi Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Penyiksaan (*Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman, Degrading Treatment, or Punishment*) – Tahun 1984 dan Indonesia meratifikasi pada tahun 1998. Dalam pasal 3 dari konvensi tersebut dinyatakan bahwa negara peserta dari Konvensi ini dilarang untuk mengusir atau mengembalikan, ataupun mengekstradisikan (*non refoulement*) ke negara lain seseorang atau sekelompok orang yang memiliki cukup alasan bahwa ia berada dalam ancaman penyiksaan/ kekerasan.

Berdasar pada konvensi ini, Indonesia sudah seharusnya menerima para pengungsi Etnis Rohingya yang berhasil terdampar di Indonesia. Indonesia juga sudah selayaknya memberikan suaka bagi para pengungsi tersebut. Mengingat para pengungsi tersebut meninggalkan Myanmar dikarenakan agenda pengusiran yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar yang mana agenda tersebut turut melibatkan pelanggaran HAM yaitu berupa penyiksaan dan perlakuan yang keji.

D. Hipotesa

Berdasarkan paparan tersebut maka dapat dibuat sebuah kesimpulan sementara. Pertimbangan Indonesia memperjuangkan nasib Pengungsi Etnis

Rohingya pasca pengusiran oleh Myanmar pada desember 2008 adalah dipengaruhi oleh kondisi politik domestik yang antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya dukungan dari parpol-parpol dan kelompok kepentingan yang merupakan sumber dukungan pemerintah yang berdaulat di Indonesia dan tradisi ketika menyelesaikan permasalahan yang sama;
- b. Kebutuhan mendapatkan pinjaman maupun bantuan luar negeri dari kreditor yang konsen terhadap penegakan HAM.
- c. Kebutuhan menjaga pertahanan dalam negeri dari imigran gelap yang datang ke Indonesia melalui mekanisme bersama yang diputuskan dalam bali proses;
- d. Konsekuensi Indonesia sebagai negara peratifikasi Konvensi Penghapusan Penyiksaan (*Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman, Degrading Treatment, or Punishment*)

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penulis menentukan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan Indonesia di balik ketertarikan Indonesia untuk memperjuangkan nasib Pengungsi Rohingya pasca pengusiran oleh Myanmar pada Desember 2008;
2. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan politik luar negeri, bahwa setiap negara apabila

melakukan tindakan tertentu terhadap negara lain ataupun merespon tindakan yang dilakukan oleh negara lain tidak akan lepas dari pertimbangan;

3. Tulisan ini didedikasikan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa Pemerintah Indonesia pun sangat konsen terhadap permasalahan kemanusiaan.

F. Metode Penelitian

Secara sederhana metode penelitian ini menggunakan analisa data primer yaitu langsung berasal dari nara sumber maupun melalui data sekunder dimana penulis tidak langsung terlibat dalam pencarian sumber-sumber yang terjadi pada masa itu, melainkan hanya mengambil sumber dari data-data yang telah tersedia melalui media majalah, koran, buku, kajian kuliah, media internet, serta sumber-sumber lain yang dapat dijadikan rujukan.

G. Jangkauan Penelitian

Sebagai usaha agar penelitian skripsi tetap fokus terhadap tema yang telah ditetapkan maka pembatasan masalah sangatlah penting untuk dilakukan. Pembatasan masalah yang dilakukan diharapkan dapat mempersempit area penelitian, sehingga penulis dapat fokus dengan masalah yang diteliti pada skripsi ini.

Fokus obyek penelitian ini dipusatkan mengenai sikap Indonesia di Forum Internasional serta pernyataan-pernyataan dan dokumen-dokumen yang dibuat dan diberikan Indonesia berkaitan dengan Pengungsi Rohingya,

Fokus waktu penelitian dimulai sejak Desember 2008 hingga akhir 2009 karena pada waktu itu Myanmar melakukan pengusiran besar-besaran dan sejak Desember 2008 tersebut Indonesia mulai gencar menyuarkan nasib Rohingya.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi yang berjudul **"PERTIMBANGAN INDONESIA MEMPERJUANGKAN NASIB PENGUNSI ROHINGYA PASCA PENGUSIRAN OLEH MYANMAR PADA DESEMBER 2008"** di susun secara sistematis menjadi 5 Bab, yaitu:

BAB I Berisi mengenai penduluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Berisi tentang permasalahan yang dihadapi oleh Rohingya di negara asal mereka yang kemudian mengakibatkan warga Etnis Rohingya berdifussi ke banyak negara.

BAB III Berisi tentang sikap Indonesia terhadap Pengungsi Rohingya serta berbagai tindakan Indonesia dalam memperjuangkan nasib Pengungsi Rohingya.

BAB IV Berisi tentang sebab-sebab mengapa Pemerintah Indonesia gigih memperjuangkan eksistensi Pengungsi Rohingya.

BAB V Berisi tentang kesimpulan dari apa yang telah dikaji dari bab-bab sebelumnya.

